

Abstrak

Penatausahaan Barang Milik Negara *Idle* berupa tanah dan bangunan pada satuan kerja wilayah KPKNL Bandar Lampung merupakan tujuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi satuan kerja pada Kementerian/Lembaga. Pada PMK Nomor 181/PMK.06/2016 terkait penatausahaan BMN dan PMK 71/PMK.06/2016 tentang tata cara pengelolaan barang milik negara yang tidak digunakan dalam menyelenggarakan tupoksi Kementerian/Lembaga. Pada pembahasan terkait BMN *Idle* ini melibatkan subjek dan objek, untuk subjek yang merupakan pengelola barang seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki tugas melakukan pengadministrasian atas segala dokumen BMN *Idle* dan untuk objek yang menjadi titik fokusnya ialah tanah dan bangunan dalam penatausahaan BMN *Idle*. Pengguna barang berperan dalam menciptakan penggunaan BMN yang optimal dan harus bertanggungjawab atas aset yang diperuntukkan kepada pihak satker sebagai pengguna barang. Di lain sisi, dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa kendala untuk penatausahaan BMN *Idle* terutama pada kegiatan inventarisasi masih terdapat tanah atau bangunan yang belum didayagukan dengan baik disebabkan perencanaan kebutuhan saat pengadaan BMN yang kurang matang ataupun diebakkan prosedur yang belum sesuai dalam pengelolaan BMN sehingga terjadilah BMN yang tidak digunakan sesuai dengan tupoksi bahkan terdapat BMN yang menganggur dibiarkan begitu saja dalam jangka waktu lama dan menyebabkan kerusakan pada BMN tersebut maka dari itu pengguna barang dan pengelola barang perlu mengoptimalkan BMN agar bermanfaat untuk masyarakat dan negara serta dalam penatausahaan juga harus transparansi agar bisa dimaksimalkan menjadi BMN yang menghasilkan PNBPN.

Kata kunci: Barang Milik Negara, Penatausahaan BMN *Idle*, Optimalisasi BMN, PMK Nomor 181/PMK.06/2016

Abstract

Administration of Idle State Property in the form of land and buildings in the work unit of the Bandar Lampung KPKNL area is the goal to carry out the duties and functions of the work unit at the Ministry/Agency. In PMK Number 181/PMK.06/2016 related to the administration of BMN and PMK 71/PMK.06/2016 concerning procedures for managing state property that is not used in carrying out the main tasks of Ministries/Agencies. In the discussion related to Idle BMN, this document involves subjects and objects, for subjects who are goods managers such as the Directorate General of State Assets which has the task of administering all Idle BMNs, and for objects, the focus point is land and buildings in the Idle BMN administration. Goods users play a role in creating optimal use of BMN and must be responsible for the assets given to the unit work as goods users. On the other hand, in its management there are still several obstacles to the administration of Idle BMN, especially in the inventory there are still land or buildings that have not been utilized properly due to inadequate planning for BMN procurement needs or procedures that are not appropriate in BMN management so that BMN is not used. By following per under the main duties and functions, there are even BMNs that are idle for long periods and cause damage to the BMN, therefore goods users and managers need to optimize BMN so that it's useful for society and the state and in administration must also be transparent so that it can be maximized into a BMN that produces PNBP.

Keywords: State Property, Idle BMN Administration, BMN Optimization, PMK Number 181/PMK.06/2016